

**INDIKASI *EARNINGS MANAGEMENT* PADA  
LAPORAN KEUANGAN FISKAL DAN LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di KPP Tegal dan Purwokerto)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi**



Oleh :

**GUNADI EKO PRASETYO**

**NIM : C4C003213**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

## ABSTRACT

Indonesian governments employ self assessment system in running its tax system. Through this system, governments trust wise tax payers to count, report, and execute the payment by themselves according to their earned income. The different treatment between accounting for commercial purpose and accounting for tax purpose make different treatment in revenue and expense recognition and further, result in different income numbers. Tax reporting mechanism emerges different interest between governments and tax payers. Governments are willing to maximize the tax rate while tax payers are willing to minimize tax burden. This study aims to examine whether there is earnings management difference between the financial report for commercial purpose and for tax reporting purpose.

This population of the study is the company tax payers reporting their tax reports at Kantor Pelayanan Pajak (Tax Office) in Tegal and Purwokerto during the period of 2001-2003. It also must have done the bookkeeping according to the Act number 16 (2000) section 28 subsection 1. The method of analysis employs the Rangan's analytical model. Paired sample t test is employed to test the hypothesis.

Using SPSS 12.0, the results show 2.748 in t-statistic at level of significance 0.05 and hence, the alternative hypothesis is accepted. It means that there is different discretionary accruals behavior between financial report for commercial purpose and tax purpose. Further, this different is affected dominantly by the change in revenue.

Keyword : Discretionary Accrual; Current Accrual and Earning Management

## ABSTRAKSI

Sistem perpajakan yang digunakan oleh negara Indonesia adalah *self assessment*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sebagai warga negara yang bijak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Dalam penghasilan dan beban, terdapat beberapa perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan sehingga menimbulkan perbedaan atas jumlah laba bersih sebagai dasar penetapan pajak. Pada dasarnya dalam pelaporan pajak sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sedangkan pihak manajemen perusahaan (Wajib Pajak) ingin membayar pajak sekecil mungkin. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah ada perbedaan yang nyata antara *earning management* pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal?.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di Tegal dan Purwokerto, dengan ketentuan perusahaan yang melakukan pelaporan pajak pada KPP Tegal dan Purwokerto periode tahun 2001-2003, yang selalu memperoleh keuntungan dan wajib pajak badan yang melakukan pembukuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 28 ayat (1).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model Rangan dan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji paired sample t test. Dari hasil perhitungan menggunakan program bantuan SPSS release 12.0 menunjukkan bahwa : Hasil pengujian dengan uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,748 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. nilai t hitung sebesar  $2,748 > t$  tabel sebesar 1,697 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga menunjukkan “Ada beda perilaku *discretionary accrual* antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial”. Dari kedua variabel tersebut, yaitu PEN dan HPP untuk laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, ternyata yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah variabel PEN (perubahan pendapatan).

Kata Kunci : *Discretionary Accrual; Current Accrual* dan *Earning Management*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Reformasi sistem perpajakan yang lama sebagai warisan Kolonial Belanda yang menekankan pada administrasi pajak yaitu penentuan pajak terhutang ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi alam kemerdekaan Indonesia.

Sistem perpajakan yang digunakan oleh negara Indonesia adalah *self assessment*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sebagai warga negara yang bijak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Pemerintah hanya mengawasi apakah wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan semestinya, dimana diharapkan kesadaran, tanggung jawab dan kejujuran wajib pajak dalam pelaksanaannya. Sarana yang memegang peranan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah akuntansi atau pembukuan.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 28 menyebutkan bahwa : wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak merupakan dasar untuk menetapkan pajak terhutang. Oleh karena itu menurut peraturan perpajakan, pembukuan tersebut harus diselenggarakan

berdasarkan suatu cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia yaitu sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam penentuan penghasilan dan beban, terdapat beberapa perbedaan perlakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan atas jumlah laba bersih sebagai dasar penetapan pajak. Perbedaan tersebut pada prinsipnya di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu beda waktu dan beda tetap. Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat menurut ketentuan pajak. (Early Suandy, 2001)

Sedangkan beda permanen merupakan perbedaan yang terjadi karena dalam penentuan laba berdasarkan peraturan pajak berbeda dengan yang ditetapkan dalam PSAK. Perbedaan tetap dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, sedangkan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. (Early Suandy, 2001)

Dalam pelaporan pajak sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sedangkan pihak manajemen perusahaan (Wajib Pajak) ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka

mendorong pihak manajemen melakukan manipulasi data laba perusahaan (*earnings management*) dengan cara mempercepat pengakuan beban atau menangguhkan pengakuan pendapatan sehingga dapat meminimumkan laba dan pajak yang dibayar menjadi kecil (Frankel dan Trezevant; 1994). Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan pendapatan dan beban pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (menandingkan beban dengan pendapatan).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. (Early Suandy, 2001)

Adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara *legal* maupun *illegal*. Hal ini dapat dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia. Menurut Erly Suandy (2001), ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak secara *illegal*, yaitu :

a. *Tax required to pay* (besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak)

Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

b. *Cost of bribe* (biaya untuk menyogok fiskus)

Semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

*c. Probability of detection*

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

*d. Size of penalty*

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Fischer dan Rosenzweig (1995), mendefinisikan *earnings management* sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Menurut Healy dan Wahlen (1998), *earnings management* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa pemegang saham tentang kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Sedangkan menurut Scott (2000), *earnings management* merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk mencapai tujuan khusus. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *earnings management* merupakan proses yang disengaja menurut batasan SAK, untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu.

Frankel dan Trezervant (1994) membuktikan bahwa penurunan tarif pajak akan memotivasi manajer untuk merekayasa laba akuntansi. Penelitian Maydew (1997) membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer untuk mempercepat

pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan. Sedangkan, Setiawati (2000) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan 1994 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah besarnya pajak yang dibayar. Dan, Mills dan Newberry (2001) menyatakan bahwa semakin besar insentif manajemen untuk melakukan *earnings management* akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Frankel dan Trezervant (1994), Maydew (1997) Setiawati (2000) maupun Newberry (2001). Dimana dalam penelitian-penelitian tersebut menitik beratkan pada penilaian keuntungan akuntansi jika dilihat dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi dan perpajakan. Tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan disini akan dianalisis mengenai *earning management* (manajemen laba) dilihat dari laporan keuangan fiskal (perpajakan) dan laporan keuangan komersial (akuntansi).

Sivaramakrishnan (1995) dimana dalam penelitian yang dilakukan tersebut mengkhususkan pada estimasi komponen *discretionary accrual* yang dimanipulasi, karena pihak luar organisasi hanya mampu melakukan penjumlahan atas angka akuntansi yang tidak dimanipulasi (*nondiscretionary*) dan dimanipulasi. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja *cash flow*, tingkat pertumbuhan, dan struktur aktiva tetap dapat menjelaskan adanya kesalahan pengukuran. Juga disimpulkan bahwa penggunaan metode NDA dapat meningkatkan secara signifikan *earning management*. CA (*Current Accrual*) ditunjukkan sebagai suatu kenaikan atau penurunan dalam saldo berbagai aktiva lancar bukan kas dan hutang lancar. (Rangan, 1998) *Current Accrual* dapat didefinisikan sebagai komponen *non cash*, dari



laporan rugi laba yang diperoleh dari pengurangan antara perubahan aktiva lancar perusahaan dengan perubahan kas dan investasi jangka pendek perusahaan terhadap bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada perusahaan tersebut. (Rangan, 1998)

*Discretionary Accrual* (DA) dapat didefinisikan sebagai hasil pengurangan antara current accrual perusahaan terhadap perubahan pendapatan perusahaan pada periode tertentu dengan perubahan piutang perusahaan pada periode tertentu ditambah dengan perubahan harga pokok perusahaan periode tertentu. (Rangan, 1998)

*Non Discretionary Accruals* (NDA) atau disebut juga sebagai bagian *earnings management*. NDA merupakan hasil bagi antara total *accrual* yang diskala dengan log total asset dengan tahun dalam periode estimasi. (Healy, 1985). Dari ketiga metode penilaian *earning management* yang meliputi (NA, CA dan NDA) akan dipilih salah satu yang akan digunakan sebagai penentu penilaian *earning management*. Dan dalam pemilihan untuk menggunakan salah satu metode ini adalah dipilih berdasarkan kemampuan metode tersebut dalam memberikan keuntungan pada sisi *earning management*. Metode yang digunakan disini adalah metode CA (*current accrual*) metode ini digunakan karena dalam metode ini akan mengkaji mengenai aktiva (kekayaan) dan kewajiban (hutang) yang merupakan dua atribut yang tidak bisa dilepaskan dari rasio keuangan perusahaan.

*Discretionary accrual* (DA) merupakan model yang digunakan untuk mengukur *earnings management* yang membedakan perusahaan manipulator dan non manipulator. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, kondisi ini dilakukan karena perusahaan yang bersangkutan mencoba untuk meminimalisasi laba yang diperoleh perusahaan. Dengan kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap minimalisasi pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan. Disamping itu,

tidak menutup kemungkinan pula bahwa pihak perpajakan juga akan mengaudit ulang terhadap keabsahan dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

Apabila suatu perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam laporan keuangan fiskal akan ditemukan selisih/beda pada pos-pos tertentu. Sehingga dari selisih atau beda tersebut akan diketahui jumlah pajak sebenarnya yang menjadi beban atau tanggungan perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, akan ditemukan perbedaan antara DA (*Discretionary Accrual*) pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan obyektifitas/kondisi sebenarnya yang diharapkan oleh perusahaan, atau dapat dikatakan pula bahwa dalam penyusunan laporan keuangan fiskal akan disusun sesuai dengan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan setiap hari dan dalam penyusunan tersebut juga tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan perusahaan, dapat dilihat dari dua segi, yaitu berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal digunakan untuk menentukan besarnya pajak, atau dapat dikatakan penyusunan laporan keuangan fiskal dimaksudkan untuk menentukan pajak yang menjadi beban perusahaan. Sedangkan laporan keuangan komersial dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada stake holder atau penanam modal dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam penyusunan laporan keuangan komersial, perusahaan berusaha untuk meminimalisasikan laba dengan cara mengurangi atau tidak memasukkan biaya-biaya tertentu.

Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan atas undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan juga didasarkan atas ketentuan undang-undang perpajakan.

Dari perbedaan penyusunan laporan keuangan tersebut (perbedaan fungsi laba), tentunya akan memberikan perbedaan pada *earning management* nya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji apakah ada perbedaan antara *earning management* pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai perbedaan perilaku *earnings management* antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (seperti pemerintah, investor, pemegang saham, masyarakat, serta profesi akuntan) dalam memahami perilaku *earnings management* oleh perusahaan di Indonesia baik untuk kepentingan fiskal maupun komersial.

#### **1. Bagi Fiskus**

- Memberikan gambaran tentang adanya *earnings management* untuk mengurangi beban pajak
- Sebagai bahan informasi dalam usaha mencari cara yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### **2. Bagi Dunia Akademik**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi pajak.